

DAMPAK PEMEKARAN TERHADAP PEMBANGUNAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

Oleh

Rosda Malia SP M.Si *

RINGKASAN

Semenjak menjadi kota otonom Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cimahi mengalami kenaikan. Dari sisi sektoral, laju pertumbuhan tiap sektor masih diatas empat persen kecuali sektor : pertanian, konstruksi, pengangkutan dan komunikasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak pemekaran terhadap pembangunan pertanian Kota Cimahi. Metode analisis yang digunakan yakni statistik deskriptif dan analisis partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan : pertumbuhan sektor pertanian mengalami penurunan, kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kota Cimahi semakin kecil, terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian serta kesejahteraan masyarakat desa yang belum berubah.

ABSTRACT

From the autonomous town of regional gross domestic product (GDP) Cimahi grew. On each sektor sektoral growth rate is still over four per cent, except : agriculture, construction, transport and communications. This study aims to determine the impact of the expansion of the Cimahi agricultural development. The method of analysis used are descriptive analysis and participative analysis. The results showed that the growth of the agricultural sektor has declined, the contribution of the agricultural sektor in GDP Cimahi increasingly smaller, passing the role of agricultural land to non-agricultural activities, as well as the well-being of rural communities that have not changed.

Key words: regional expansion, agriculture development

* Dosen Faperta UNSUR

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan selama ini yang perencanaannya dominan menggunakan pendekatan *top down*, telah banyak menimbulkan kegagalan. Keadaan ini menimbulkan berbagai tuntutan dari daerah, mulai dari keinginan untuk merdeka ataupun melepaskan diri dari ikatan administrasi wilayah di atasnya (isu pemekaran). Tuntutan umumnya berasal dari daerah yang merasa kaya potensi sumberdaya namun hasilnya kurang dapat dirasakan. Praktek pengurusan sumberdaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di pusat yang

kurang memberi pengaruh balik pada pertumbuhan daerah asal sumberdaya, menjadi semakin tegas fenomena kesenjangan (Agusniar, 2006).

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membuka peluang adanya pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Kota Cimahi merupakan kota hasil pemekaran yang berada di Propinsi Jawa Barat. Terletak di sebelah barat Kota Bandung, dahulu Cimahi merupakan bagian dari

Kabupaten Bandung. Cimahi ditetapkan sebagai kota otonom berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001 pada tanggal 21 Juni 2001.

Semenjak menjadi kota otonom Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cimahi mengalami kenaikan. Nilai PDRB Kota Cimahi atas dasar harga konstan Tahun 2000 - 2006 cenderung bertambah, hanya laju peningkatannya berbeda setiap tahun. Begitupula dengan nilai PDRB Kota Cimahi atas dasar harga berlaku Tahun 2000 – 2006 cenderung meningkat. Dari sisi sektoral, laju pertumbuhan sektor – sektor masih diatas empat persen kecuali sektor pertanian, konstruksi serta pengangkutan dan komunikasi.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran terhadap pembangunan pertanian Kota Cimahi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemekaran Wilayah

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001 melalui pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada daerah sehingga memberikan implikasi dan peluang kepada daerah-daerah tertentu untuk memekarkan wilayahnya sebagai daerah otonom. Pada prinsipnya dengan pemekaran/penataan daerah menjadi daerah otonom diharapkan terjadi efisiensi dan efektifitas

pelayanan publik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, serta terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Pembangunan Daerah

Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah aspek ekonomi. Menurut Arsyad (1999) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah penekanannya didasarkan pada *kekhasan* daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia dan sumber fisik secara lokal.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dikatakan sebagai ukuran produktifitas wilayah yang paling umum diterima secara luas sebagai standar ukuran pembangunan dalam skala wilayah. Oleh karenanya, walaupun memiliki berbagai kelemahan, PDRB dinilai sebagai tolak ukur pembangunan yang paling operasional dalam skala negara di dunia (Rustiadi. 2004).

2.3 Pembangunan Pertanian

Pembangunan ekonomi sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian agar dapat meningkatkan pendapatan petani dan pemerataan pembangunan pedesaan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Cimahi Propinsi Jawa Barat sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Bandung, dari Bulan Januari – Juni 2009.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara mengambil langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yang dipilih secara sengaja (*purposive sampling*). Responden yang diwawancara sebanyak 48 orang dengan latar belakang jenis kelamin, pendidikan, usia dan pekerjaan yang berbeda-beda. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi dan dinas-dinas yang terkait dengan penelitian, BPS dan hasil penelitian terdahulu. Data yang digunakan setelah pemekaran mulai tahun 2001-2006.

3.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan meliputi statistika deskriptif dan analisis partisipatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Wilayah Penelitian

Kota Cimahi berada antara 107° 30' 30" BT – 107° 34' 30" BT dan 6° 50' 00" - 6° 56' 00" Lintang selatan dengan batas – batas sebagai berikut : batas utara dengan Kabupaten Bandung, batas selatan dengan Kabupaten Bandung, batas timur dengan Kota Bandung dan batas barat dengan Kabupaten Bandung. Kota Cimahi termasuk wilayah Propinsi Jawa

Barat, meliputi tiga kecamatan dan 15 kelurahan. Areal pertanian terletak di Cimahi Utara.

Luas Kota Cimahi secara keseluruhan mencapai 40,25 Ha dengan penggunaan lahan diperuntukan, pemukiman mencapai 1,609 Ha (39,21%), lahan militer 375 Ha (9,14%), Industri 700 Ha (17,06%), Pesawahan 326 Ha (7,94%), Tegalan 382 Ha (9,31%), Kebun Campuran 367 Ha (8,94%), Pusat Perdagangan 140 Ha (3,41%) dan lahan yang dipergunakan untuk lain-lain mencapai 204.73 Ha (4,99%).

4.2 Karakteristik Responden Penelitian

Kelompok responden berpendidikan SD berusia antara 43 - 50 tahun. Responden wanita umumnya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Usia lanjut menyulitkan responden wanita dalam memperoleh pekerjaan. Sementara responden pria umumnya bekerja sebagai buruh. Buruh pabrik atau bangunan.

Kelompok responden berpendidikan SMP berusia antara 29 – 48 tahun, umumnya di atas 40 tahun. Responden wanita bekerja sebagai buruh, ibu rumah tangga dan wirausaha. Responden pria bekerja sebagai pegawai swasta, buruh dan wirausaha. Jenis pekerjaan responden kelompok ini, hampir sama dengan pekerjaan kelompok responden berpendidikan SD.

Kelompok responden berpendidikan SMA berusia antara 20 – 34 tahun, tergolong usia produktif. Tidak terdapat perbedaan pekerjaan antara responden pria dan wanita. Pekerjaan responden kelompok ini lebih bervariasi yaitu sebagai pegawai swasta, PNS atau wirausaha. Sebagian besar responden bekerja sebagai PNS.

Kelompok responden berpendidikan Perguruan Tinggi berusia antara 27 – 40 tahun, umumnya di atas usia 30 tahun. Usia yang masih produktif. Tidak terdapat perbedaan antara pekerjaan responden wanita dan pria. Responden kelompok ini bekerja sebagai PNS, pegawai swasta dan wirausaha. Sebagian besar bekerja sebagai PNS.

4.3 Dampak Pemekaran terhadap Pembangunan Pertanian Kota Cimahi

4.4

a. Pertumbuhan Sektor Pertanian Mengalami Penurunan

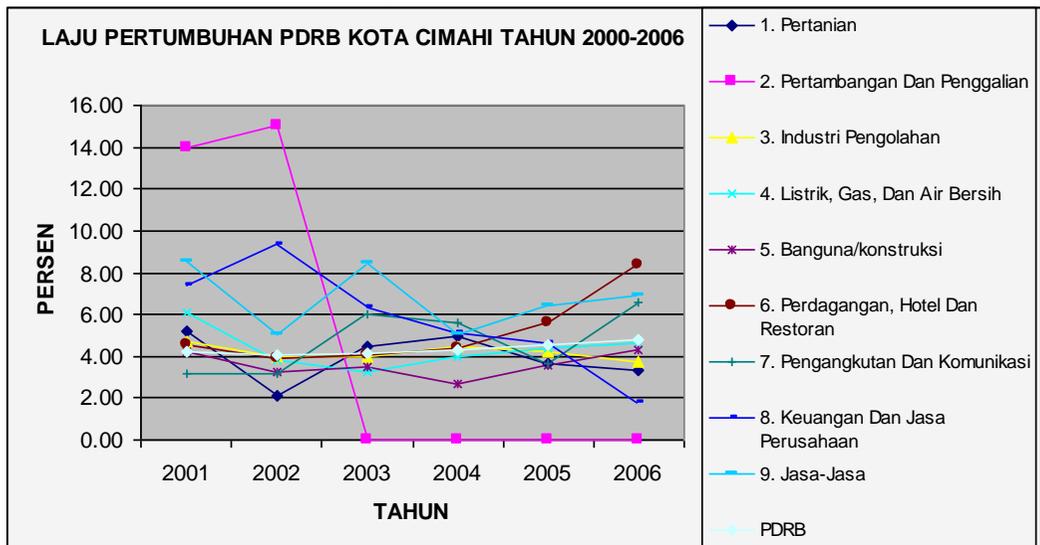
Pada saat pemekaran (Tahun 2001), laju pertumbuhan sebesar 4.254 persen. Setahun setelah pemekaran laju mengalami penurunan menjadi sebesar 4.033 persen. Penurunan terjadi karena proses adaptasi pemekaran. Tahun berikutnya pertumbuhan

ekonomi naik menjadi 4.171 persen, sekalipun mengalami peningkatan namun laju belum sebesar sebelum pemekaran. Tahun 2004 laju mengalami meningkat menjadi 4,353 persen dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 4.56 persen dan 4.804 persen di tahun – tahun berikutnya. Berarti pada Tahun 2004 – 2006 laju pertumbuhan sudah melebihi sebelum pemekaran.

Kalau dibandingkan, laju pertumbuhan ekonomi daerah otonom baru di bawah daerah induk. Artinya kinerja daerah otonom baru belum seperti daerah induknya.

Proporsi setiap sektor sebelum maupun setelah pemekaran relatif sama. Industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar sementara kontribusi kedua disumbang sektor perdagangan.

Gambar 1 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Cimahi



Sumber data : BPS Kota Cimahi (Tahun 2002 - 2007)

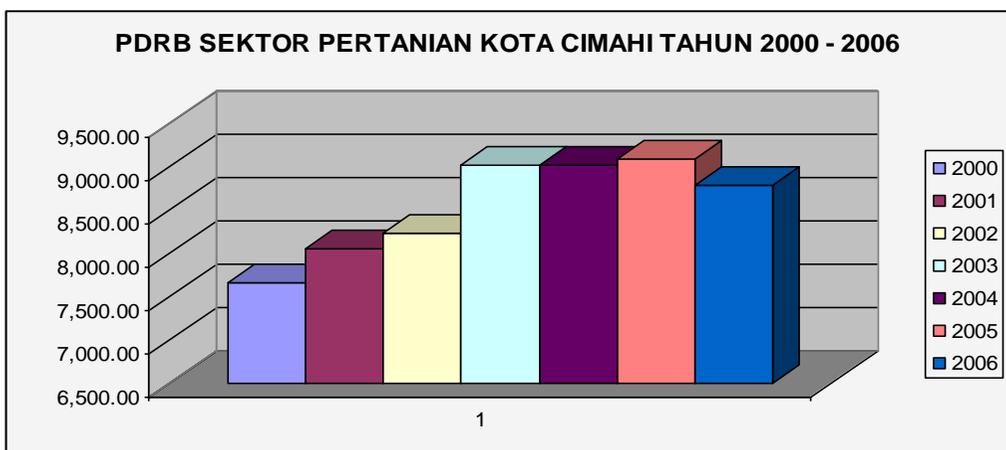
Kalau membandingkan laju pertumbuhan tahun 2001 dan 2006

(gambar 1) terlihat bahwa enam sektor mengalami penurunan. Sektor yang mengalami penurunan yakni sektor pertanian, industri, pertambangan, listrik, keuangan dan jasa. Penurunan terbesar dialami sektor pertambangan dan penggalian. Sektor yang mengalami peningkatan yakni sektor bangunan, perdagangan dan pengangkutan. Kenaikan terbesar dialami sektor perdagangan.

b. Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB Kota Cimahi semakin kecil

Sektor ini merupakan gabungan dari sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Besarnya PDRB sektor pertanian Tahun 2000 – 2006 dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. PDRB Sektor Pertanian Kota Cimahi Tahun 2000 - 2006



Sumber data : BPS Kota Cimahi (Tahun 2002 – 2007)

Sekalipun nilai PDRB sektor pertanian meningkat terus, namun kontribusinya dalam PDRB Kota Cimahi semakin kecil, yakni sekitar 0,2 persen. Tahun 2000 sub sektor tanaman pangan memiliki kontribusi terbesar dalam sektor pertanian yakni sebesar 53 persen. Kontribusi terkecil berasal dari sub sektor perkebunan yakni sebesar 1,3 persen. Tahun 2006 kontribusi terbesar tetap berasal dari sub sektor tanaman pangan yakni sebesar 52,4 persen. Sub sektor perkebunan tetap sebagai penyumbang terkecil yakni sebesar 1,1 persen. Berarti sebelum dan setelah pemekaran

tidak terdapat perubahan dalam proporsi sub – sub sektor pertanian.

c. Alih Fungsi Lahan Pertanian ke non Pertanian

Setelah pemekaran terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Data BPS (2006) menunjukkan 221 ha lahan pertanian telah beralih fungsi. Lahan tersebut merupakan lahan : beririgasi teknis (183 ha), irigasi setengah teknis (8 ha), tadah hujan (7ha) dan irigasi bukan PU (23 ha). Lahan pertanian yang beralih fungsi umumnya terletak di Kecamatan Cimahi tengah dan selatan.

Sebelum beralih fungsi, lahan tersebut ditanami : padi sawah (69 ha),

jagung (25 ha), ubi kayu (3 ha), ubi jalar (8 ha) dan tomat (16 ha). Tidak ditemukan data produksi tanaman lainnya.

d. Kesejahteraan Masyarakat Desa Belum Berubah

Salah satu tujuan pemekaran adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran tingkat kesejahteraan umumnya dilakukan berdasarkan data sekunder. Angka – angka statistika terkadang memberikan informasi yang menyimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin lebih baik, namun belum tentu dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Untuk melengkapi pengukuran tingkat kesejahteraan, perlu dilakukan berdasarkan persepsi masyarakat (responden)

Dalam penelitian ini kesejahteraan didekati melalui empat hal yaitu dampak pemekaran terhadap bidang ekonomi, pelayanan pemerintah, partisipasi masyarakat dan fasilitas umum.

1). Bidang ekonomi

Pengukuran dampak pemekaran terhadap bidang ekonomi didekati melalui tiga hal, yaitu pengaruhnya terhadap pendapatan, lowongan kerja dan kesempatan berusaha. Secara umum responden berpendapat pemekaran memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian dengan meningkatnya pendapatan, bertambahnya lowongan kerja dan meningkatnya kesempatan berusaha. Namun perubahan tersebut baru dinikmati responden berpendidikan SMA dan perguruan tinggi terutama yang tinggal di Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan.

Sebanyak 24 orang (50%) menjawab mengalami peningkatan pendapatan, 12 orang responden tidak mengalami perubahan (25%) pendapatan dan sisanya mengalami penurunan pendapatan. Yang mengalami kenaikan pendapatan umumnya responden berpendidikan SMA dan Perguruan Tinggi. Sebagian besar tinggal di Kecamatan Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan. Tanggapan responden terhadap perubahan pendapatan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Tanggapan Responden terhadap Perubahan Pendapatan

Jawaban	Kecamatan Cimahi			Jumlah Responden (org)	%
	Utara	Tengah	Selatan		
Turun	4	4	4	12	25
Tetap	6	2	4	12	25
Naik	6	10	8	24	50
Jumlah Responden	16	16	16	48	100

Sumber data : data primer (Tahun 2009)

Sebagian besar responden berpendapat terdapat peningkatan lowongan kerja. Namun bagi responden yang berpendidikan SD, mereka menilai pemekaran justru menurunkan tingkat lowongan kerja.

Responden berpendidikan SMP menilai belum terdapat perubahan dalam lowongan kerja. Tanggapan responden terhadap perubahan lowongan kerja dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Tanggapan Responden terhadap Perubahan Lowongan Kerja

Jawaban	Kecamatan Cimahi			Jumlah Responden (org)	%
	Utara	Tengah	Selatan		
Turun	4	4	4	12	25
Tetap	6	2	4	12	25
Naik	6	10	8	24	50
Jumlah Responden	16	16	16	48	100

Sumber data : data primer (Tahun 2009)

Sebagian besar responden (20 orang) berpendapat terdapat peningkatan kesempatan berusaha, 16 orang menilai tidak terdapat perubahan. Yang menjawab terdapat peningkatan kesempatan berusaha

adalah responden yang tinggal di Kecamatan Cimahi Tengah dan berpendidikan SMA dan Perguruan tinggi. Tanggapan responden terhadap perubahan kesempatan berusaha dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Tanggapan Responden terhadap Perubahan Kesempatan Berusaha

Jawaban	Kecamatan Cimahi			Jumlah Responden (org)	%
	Utara	Tengah	Selatan		
Turun	4	4	4	12	25.00
Tetap	8	2	6	16	33.33
Naik	4	10	6	20	41.67
Jumlah responden	16	16	16	48	100

Sumber data : data primer (Tahun 2009)

2). Pelayanan Pemerintah

Indikator pelayanan pemerintah didekati dari layanan administrasi kependudukan (KTP, KK, IMB dll) dan administrasi usaha (terkait izin pendirian usaha). Umumnya responden berpendapat pemekaran telah meningkatkan pelayanan pemerintah.

Sebagian besar responden (39 orang) menjawab pelayanan pemerintah dalam administrasi

kependudukan semakin baik dan sisanya menjawab belum ada perubahan. Tidak ada responden yang berpendapat pelayanan pemerintah semakin menurun. Yang menjawab tidak terdapat perubahan adalah responden berpendidikan SD dan tinggal di Kecamatan Cimahi selatan dan utara. Tanggapan responden terhadap perubahan pelayanan administrasi kependudukan dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Tanggapan Responden terhadap Perubahan Pelayanan Adm Kependudukan

Jawaban	Kecamatan Cimahi			Jumlah Responden (org)	%
	Utara	Tengah	Selatan		
Turun	0	0	0	0	0.00
Tetap	5	0	4	9	18.75
Naik	11	16	12	39	81.25
Jumlah	16	16	16	48	100

Sumber data : data primer (Tahun 2009)

Tiga puluh orang responden menjawab ada peningkatan dalam pelayanan izin usaha dan sisanya menjawab tidak terdapat perubahan. Yang menjawab terdapat peningkatan pelayanan izin usaha adalah responden berpendidikan SMA dan perguruan tinggi. Responden

yang berwirausaha dan berpendidikan SMP, umumnya tidak mengurus izin usaha. Sehingga mereka berpendapat tidak terdapat perubahan. Tanggapan responden terhadap perubahan pelayanan administrasi usaha terdapat dalam tabel 5.

Tabel 5. Tanggapan Responden terhadap Perubahan Pelayanan Administrasi Usaha

Jawaban	Kecamatan Cimahi			Jumlah Responden (org)	%
	Utara	Tengah	Selatan		
Turun	0	0	0	0	0.00
Tetap	5	5	8	18	37.50
Naik	11	11	8	30	62.50
Jumlah responden	16	16	16	48	100

Sumber data : data primer (Tahun 2009)

3). Partisipasi Masyarakat

Dampak pemekaran terhadap partisipasi masyarakat didekati melalui realisasi usulan program dari masyarakat, kesempatan mengkritik pemerintah, keterlibatan dalam program pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Sebagian besar responden berpendapat belum terdapat perubahan dalam partisipasi masyarakat.

Lima puluh delapan persen lebih responden berpendapat terdapat peningkatan dalam realisasi usulan program dari masyarakat. Namun masih terbatas pada realisasi pembangunan kelurahan. Responden yang berpendapat demikian berpendidikan SMA dan perguruan tinggi. Tanggapan responden terhadap perubahan realisasi usulan program dari masyarakat terdapat dalam tabel 6.

Tabel 6. Tanggapan Responden terhadap Perubahan Realisasi Usulan Prog Dari Masyarakat

Jawaban	Kecamatan Cimahi			Jumlah responden (org)	%
	Utara	Tengah	Selatan		
Turun	0	0	0	0	0.00
Tetap	10	8	10	28	58.33
Naik	6	8	6	20	41.67
Jumlah	16	16	16	48	100

Sumber data : data primer (Tahun 2009)

Sebagian besar responden (36 orang) menilai belum ada perubahan dalam partisipasi mengkritisi kinerja pemda. Sebagian lagi (12 orang) menjawab terdapat peningkatan kesempatan, yang menjawab demikian

adalah responden berpendidikan perguruan tinggi. Tanggapan terhadap perubahan partisipasi mengkritisi kinerja pemda dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Tanggapan Responden terhadap Perubahan Partisipasi Mengkritisi Kinerja Pemda

Jawaban	Kecamatan Cimahi			Jumlah Responden (org)	%
	Utara	Tengah	Selatan		
Turun	0	0	0	0	0.00
Tetap	12	12	12	36	75.00
Naik	4	4	4	12	25.00
Jumlah	16	16	16	48	100

Sumber data : data primer (Tahun 2009)

Dua puluh tujuh responden menjawab belum terdapat perubahan dalam program pendidikan, walaupun ada baru dinikmati 9 responden. Sisanya menjawab terdapat penurunan

dalam program pendidikan. Yang menjawab demikian adalah responden berpendidikan SD karena mahal biaya pendidikan.

Tabel 8. Tanggapan Responden terhadap Perubahan Partisipasi Program Pendidikan

Jawaban	Kecamatan Cimahi			Jumlah Responden (org)	%
	Utara	Tengah	Selatan		
Turun	4	4	4	12	25.00
Tetap	10	8	9	27	56.25
Naik	2	4	3	9	18.75
Jumlah responden	16	16	16	48	100

Sumber data : data primer (Tahun 2009)

Lima puluh persen responden menjawab belum terdapat peningkatan dalam program kesehatan. Sisanya menjawab terjadi penurunan program kesehatan. Mahalnya biaya kesehatan

menjadi alasan penilaian tersebut. Tanggapan responden terhadap perubahan partisipasi program kesehatan dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Tanggapan Responden terhadap Perubahan Partisipasi Program Kesehatan

Jawaban	Kecamatan Cimahi			Jumlah Responden (org)	%
	Utara	Tengah	Selatan		
Turun	8	8	8	24	50.00
Tetap	8	8	8	24	50.00
Naik	0	0	0	0	0.00
Jumlah responden	16	16	16	48	100

Sumber data : data primer (Tahun 2009)

Sebagian besar responden (32 orang) menjawab belum terdapat perubahan dalam program pengentasan kemiskinan. Delapan orang menjawab terjadi peningkatan dan sisanya menjawab terjadi penurunan. Yang menjawab terjadi peningkatan adalah

responden berpendidikan perguruan tinggi. Sementara responden berpendidikan SD umumnya menjawab terjadi penurunan program kemiskinan. Tanggapan responden terhadap perubahan partisipasi

program pengentasan kemiskinan dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Tanggapan Responden thdp Perubahan Partisipasi Prog Pengentasan Kemiskinan

Jawaban	Kecamatan Cimahi			Jumlah Responden (org)	%
	Utara	Tengah	Selatan		
Turun	4	2	2	8	16.67
Tetap	9	9	14	32	66.67
Naik	3	5	0	8	16.67
Jumlah responden	16	16	16	48	100

Sumber data : data primer (Tahun 2009)

4.) Fasilitas Umum

Pemekaran diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas umum. Fasilitas umum yang dimaksud yakni jalan, air bersih, listrik, irigasi, sekolah, fasilitas kesehatan,

transportasi, terminal dan pasar. Terdapat peningkatan pada fasilitas umum, sehingga sebagian besar responden menilai sejak pemekaran Kota Cimahi semakin bagus kondisinya.

Tabel 11. Tanggapan Responden terhadap Perubahan Infrastruktur setelah pemekaran

Jawaban	Kecamatan Cimahi			Jumlah Responden (org)	%
	Utara	Tengah	Selatan		
Turun	4	1	2	7	14.58
Tetap	4	5	7	16	33.33
Naik	8	10	7	25	52.08
Jumlah	16	16	16	48	100

Sumber data :data primer (Tahun 2009)

4.4 Pembahasan

Pemekaran wilayah telah memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan struktur ekonomi. Setelah pemekaran, pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Selain jumlah PDRB setiap tahunnya meningkat, laju pertumbuhannya pun cenderung meningkat. Namun nilai PDRB Kota Cimahi masih jauh di bawah nilai PDRB Kab. Bandung. Laju pertumbuhan PDRB Kota Cimahi juga di bawah laju pertumbuhan PDRB Kab. Bandung.

Kontribusi terbesar dalam PDRB berasal dari sektor industri pengolahan, yakni sebesar 61 persen. Ini menunjukkan bahwa Kota Cimahi merupakan kota industri. Strategi ini

sudah dicanangkan sebelum pemekaran dan masih dilakukan sampai kini. Karena itu sektor industri tetap memimpin perekonomian sampai sekarang.

Setelah pemekaran lima sektor mengalami penurunan laju pertumbuhan, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor keuangan. Bahkan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian hanya sampai Tahun 2002. Penurunan laju pertumbuhan sektor pertanian diakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Pemekaran membutuhkan sejumlah lahan pertanian untuk dijadikan perkantoran, perumahan, pertokoan dan kebutuhan lainnya.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menurunkan daya beli masyarakat. Ini menyebabkan penurunan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor keuangan. Sementara hilangnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalan karena sudah habisnya sumberdaya alam yang dimiliki Kota Cimahi.

Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian pada dasarnya merupakan respon perubahan kebijakan ekonomi. Konversi lahan pertanian pada hakekatnya tidak hanya menyangkut hilangnya peluang memproduksi pangan tetapi menyangkut substansi permasalahan kesempatan usaha dan berusaha, pendapatan petani dan keadilan sosial. Disinilah sumber permasalahan yang patut mendapat perhatian dengan seksama (Sumaryanto, Hermanto, E. Pasandaran, 1995)

Meningkatnya aktifitas pemerintah dan perekonomian telah meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha sebagian masyarakat. Hanya masyarakat berpendidikan baik yang mampu menangkap peluang tersebut. Harus ada perubahan, agar pemekaran dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.

Pemekaran telah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, hal ini dilihat dari meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan mulai terbukanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan usaha menjadi lebih mudah. Selain letak kantor pemda yang lebih dekat, pemda juga berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kesempatan berpartisipasi baru terealisasi dalam usulan pembangunan kelurahan.

Pemekaran yang baru berusia tujuh tahun, masih sibuk berbenah dalam pembangunan sarana dan prasarana. Sehingga program pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan belum banyak dilakukan.

Pembangunan sarana dan prasarana telah membuat kondisi Kota Cimahi lebih baik setelah pemekaran. Beberapa fasilitas umum dinilai lebih baik setelah pemekaran. Fasilitas tersebut yaitu jalan, listrik, sekolah (SD) dan pasar. Hal ini karena alokasi dana sarana pelayanan umum untuk bidang pendidikan dan infra struktur cukup besar.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dampak pemekaran terhadap pembangunan pertanian Kota Cimahi berupa :

- a. Pertumbuhan sektor pertanian mengalami penurunan.
- b. Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kota Cimahi semakin kecil.
- c. Terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang menyebabkan produksi hasil pertanian mengalami penurunan dan hilangnya sebagian fasilitas irigasi.
- d. Kesejahteraan masyarakat desa belum mengalami perubahan.

5.2 Saran

1. Pembangunan pertanian harus lebih ditingkatkan. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian harus dihindari, mengingat pentingnya fungsi lahan pertanian.
2. Manfaat pemekaran harus dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, program pendidikan,

kesehatan dan mengentaskan kemiskinan harus lebih ditingkatkan.

3. Kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi lebih ditingkatkan, agar pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Agusniar, A. 2006. *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Perekonomian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat* (Tesis). Bogor : Pascasarjana IPB.

Anonymous, *Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah*.

_____. *Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

_____. *Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang*

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jogjakarta : PT. BPFE.

BPS. 2006. *Profil Pemerintah Kota Cimahi*. _____ . 2002. 2006. *Kota Cimahi dalam Angka*.

Rustiadi, E, S. Saefulhakim dan D.R. Panuju. 2004. *Diktat Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Bogor : Fakultas Pertanian IPB.

Sumaryanto, Hermanto, E. Pasandaran. 1995. *Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah terhadap Pelestarian Swasembada Beras dan Sosial Ekonomi Pertanian*. Makalah Lokakarya Persaingan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air : Dampaknya Terhadap Keberlanjutan Swasembada Pangan. Bogor